

**WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI
(TITIP JUAL) ANTARA ONLINE SHOP CACAFOOD.IDN DENGAN TOKO
SARI SAYUR DI KOTA TEGAL**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

DIYAH KRISDIYANTI

NPM 5117500004

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI
(TITIP JUAL) ANTARA ONLINE SHOP CACAFOOD.IDN DENGAN TOKO
SARI SAYUR DI KOTA TEGAL

Oleh :

DIYAH KRISDIYANTI

NPM. 5117500004

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 16 Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Nuridin, S.H., M.H

NIDN. 0610116002



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H

NIDN. 0608087702



Mengetahui
Dekan,

Dr. D. Achmad Irfan Hamzani, S.H., M.H.

NIDN. 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

**WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI
(TITIP JUAL) ANTARA ONLINE SHOP CACAFOOD.IDN DENGAN
TOKO SARI SAYUR DI KOTA TEGAL**

Oleh :

DIYAH KRISDIYANTI
NPM. 5117500004

Tegal, 28 Juli 2021

Penguji I



Dr. H. Sanusi, S.H., M.H
NIDN. 0609086202

Penguji II



Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H
NIDN. 0619058703

Pembimbing I



Dr. H. Nuridin, S.H., M.H
NIDN. 0610116002

Pembimbing II



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H
NIDN. 0608087702



Mengetahui
Dekan,

Dr. Achmad Iwan Hamzani, S.H., M.H.
NIDN. 0615067604

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Diyah Krisdiyanti

NPM : 5117500004

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 14 Juni 1998

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN KONSINYASI (TITIP JUAL) ANTARA ONLINE SHOP
CACAFOOD.IDN DENGAN TOKO SARI SAYUR DI KOTA TEGAL**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Tegal, 28 Juli 2021

Yang Menyatakan


Diyah Krisdiyanti

ABSTRAK

Diyah Krisdiyanti, “Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi (Titip Jual) Antara Online Shop Cacafood.idn dengan Toko Sarisayur di Kota Tegal”: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, 2021.

Perjanjian konsinyasi adalah bentuk perjanjian titip jual yang mana pihak pertama selaku pemilik barang menyerahkan atau menitipkan barangnya untuk dijual oleh pihak kedua dengan memberikan komisi, perjanjian konsinyasi ini dalam perkembangannya banyak digunakan oleh beberapa pelaku usaha baik dari usaha kecil, menengah dan perusahaan besar. Cacafood.idn adalah salah satu contoh pelaku usaha produk frozen food yang menjalankan usahanya dengan cara menitipkan barangnya kepada beberapa pihak yang ingin mendapatkan komisi dari hasil menjual barangnya sebagai contoh pihak toko sari sayur. Hal ini dilakukan oleh pihak cacafood.idn untuk memastikan produknya tersebut laku dipasaran. Akan tetapi dalam beberapa hal sering terjadi masalah dalam penerapan perjanjian ini, terutama yang dilakukan oleh pihak kedua. Penelitian ini sendiri memiliki tujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi Online Shop Cacafood.idn dengan Toko Sari Sayur Di Kota Tegal dan Untuk mengetahui penerapan perjanjian konsinyasi antara Online Shop Cacafood.idn dengan Toko Sari Sayur di Kota Tegal.

Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum deskriptif. Jenis data yang dipergunakan meliputi data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya dan menggunakan metode wawancara.

Hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi antara cacafood.idn dan toko sari sayur kota Tegal yaitu yang pertama terjadi karena faktor individu yang tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan prestasi atau karena lalai. Sedangkan yang kedua faktor keadaan yang memaksa yaitu dimana keadaan ini diluar kendali para pihak, seperti bencana alam, perampokan, cuaca ekstrem dan lain-lain. Penerapan perjanjian konsinyasi antara cacafood.idn dan toko sari sayur sendiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan terpenuhi seluruhnya meskipun pembentukan perjanjian tersebut secara lisan dan hanya disaksikan beberapa orang.

Kata Kunci : Konsinyasi, Perjanjian, Wanprestasi

ABSTRACT

Diyah Krisdiyanti, “Default in the Implementation of Consignment Agreements (Titip Jual) Between Online Shop Cacafood.idn and Toko Sarisayur in Tegal City”: Law Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal, 2021.

A consignment agreement is a form of a surrogate sale agreement in which the first party as the owner of the goods submits or entrusts the goods for sale by a second party by giving a commission, this consignment agreement in its development is widely used by several business actors from small, medium and large companies. Cacafood.idn is one example of a frozen food product business actor who runs his business by entrusting his goods to several parties who want to get a commission from the results of selling their goods, for example the Sarisayur shop. This is done by cacafood.idn to ensure that their products sell well in the market. However, in some cases problems often occur in the implementation of this agreement, especially those carried out by the second party. This study aims to determine the factors that cause default in the implementation of the online shop Cacafood.idn consignment agreement with the SariSayur Store in Tegal City and to determine the implementation of the consignment agreement between the Cacafood.idn Online Shop and the SariSayur Shop in Tegal City.

This legal research approach uses a normative-empirical approach and when viewed from the objective, it is included in descriptive legal research. The types of data used include secondary and primary data. Data collection techniques used include literature study in the form of books, legislation, documents and so on and using the interview method.

The results of this research show that there are several factors that cause default in the consignment agreement between cacafood.idn and the Sarisayur shop in Tegal city, the first occurs because of individual factors who do not have good faith in carrying out achievements or because of negligence. Meanwhile, the second factor is forcing circumstances, namely where this situation is beyond the control of the parties, such as natural disasters, robberies, extreme weather and others. The implementation of the consignment agreement between cacafood.idn and the sarisayur shop itself is in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia, especially the Civil Code and is fully fulfilled even though the agreement was formed verbally and only witnessed by a few people.

Keywords: Consignment, Agreement, Default

HALAMAN MOTTO

“Memulai Dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan Dengan Penuh Keikhlasan,
Menyelesaikan Dengan Penuh Kebahagiaan.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki dan semua yang saya butuhkan hingga dapat terselesaikan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua saya yang tercinta yaitu Ibu Nurmaeni dan Bapak Ratono yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang, yang telah memberikan semangat untuk terus maju dan mendoakan keberhasilan anaknya, terimakasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan.
3. Adikku tercinta, Tri Vandi Prayogi yang telah memberikan semangat untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih untuk keluarga besar saya yang senantiasa telah memberikan semangat dan dukungannya demi kelancaran skripsi ini.
5. Kekasih saya Aditya Firmansyah yang selalu memberikan dukungan, arahan, dan motivasi serta tiada henti memberikan semangat dan doa demi kelancaran skripsi ini.
6. Sahabat seperjuangan saya Azalia Verdita, Aqil Budi S, M Luthfanza Rizki, M Doni Yahya Noviyanto, Chandra Setiaji yang selalu menemani dan membantu saya sejak awal perkuliahan hingga saat ini yang saling memberikan semangat, dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Serta sahabat saya Aulia Afifa, Rini Prihatiningtyas, Kristin Ayu, Nalurita Regina, Yunita Afifa, Intan Ayu Lestari , Tari Dwi S, dan Windi yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Bapak Toni Haryadi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Imam Asmarudin S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Bapak Muhammad Wildan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Bapak Dr. H. Nuridin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan banyak

bimbingan, nasehat serta motivasi dan inspirasi untuk menjadi lebih baik dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing dan memberi pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, atas seluruh curahan bimbingannya selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi dengan baik di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
10. Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, atas bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis berharap melalui karya tulis ilmiah ini, dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, bangsa, dan agama. Semoga segala bantuan, perhatian, pengarahan, dan motivasi dari pihak-pihak tersebut di atas, mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah SWT. Aamiin.

Tegal, 28 Juli 2021

Diyah Krisdiyanti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Diyah Krisdiyanti

NPM : 5117500004

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 14 Juni 1998

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan Raya Larangan Munjung Agung No. 84 Rt
02 Rw 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri Munjung Agung 01	2004	2010
2	SMP Negeri 3 Kota Tegal	2010	2013
3	SMA Negeri 4 Kota Tegal	2013	2016
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2017	2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 28 Juli 2021

Hormat saya,

Diyah Krisdiyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	18
1. Definisi Perjanjian	18
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	20
3. Macam-Macam Perjanjian	24
4. Hapusnya Perjanjian	26
5. Asas-Asas Perjanjian	27
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Konsinyasi.....	30
1. Pengertian Perjanjian Konsinyasi	30

2.	Syarat Perjanjian Konsinyasi	33
3.	Dasar Hukum Perjanjian Konsinyasi	33
C.	Tinjauan Umum tentang Wanprestasi	37
1.	Pengertian Wanprestasi.....	37
2.	Bentuk-Bentuk Wanprestasi	40
3.	Kerjasama dalam Perjanjian Konsinyasi.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		45
A.	Hasil Penelitian.....	45
B.	Pembahasan	52
1.	Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Online Shop Cacafood.idn dengan Toko Sari Sayur Di Kota Tegal	52
2.	Penerapan Perjanjian Konsinyasi antara Online Shop Cacafood.idn dengan Toko Sari Sayur di Kota Tegal	56
BAB IV PENUTUP		63
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan sosial, pembangunan dan modernisasi berhubungan satu sama lain dengan erat, seperti halnya terjadi di Indonesia dan juga Negara-negara sedang berkembang lainnya.¹ Perdagangan pada era saat ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Akan tetapi, adanya pandemic covid-19 memberikan berbagai dampak yang sangat buruk terhadap kemajuan tersebut. Sektor ekonomi adalah salah satu sektor yang paling mengalami keterpurukan saat ini. Pelaku usaha dengan adanya covid-19, mengalami berbagai kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Selain itu kian ketatnya persaingan antara pengusaha menjadikan mereka dituntut untuk semakin cermat supaya usaha mereka tetap dapat bertahan dan berkembang. Oleh karenanya banyak para pengusaha secara tidak langsung maupun langsung, dianjurkan untuk mempunyai kemampuan yang lebih dalam bidang usahanya. Setiap pengusaha memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan yang maksimal². Akan tetapi pada prakteknya banyak pelaku usaha belum bisa dengan mudah mencapai target yang diinginkan. Guna mencapai target yang diinginkan dengan melakukan berbagai upaya, salah satu caranya adalah dengan melakukan kerjasama antara pengusaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain. Seiring dengan perkembangan teknologi dan

¹Fajar Dian Aryan, Jurnal: *Pendampingan Perempuan Warga Binaan Pemasyarakatan Menuju Perempuan Berdikari di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tegal*, Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2019, hlm. 43

²Frans M. Royan, *Creating Effective Sales Force*, Jakarta : CV. Andi Offset, 2004, Ed. Ke-2, hlm.1

informasi pelaku usaha juga dituntut untuk memasarkan produknya tidak hanya secara konvensional akan tetapi secara *online* atau yang saat ini masyarakat sebut dengan *online shop*. *Online shop* sendiri adalah perdagangan digital yang mana pelaku usaha tidak perlu membuka lapak yang dapat dilihat oleh kasat mata.

Kita mengenal adanya beberapa kerjasama yang dilandasi perjanjian yang jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari memiliki panggilan nama tertentu, tetapi tidak diatur di dalam regulasi yang ada, setidaknya di Indonesia belum diberikan pengaturan secara khusus, berikut ini sebagian contoh perjanjian tak bernama adalah Perjanjian *sewabeli*, *Fidusia*, *Franchise*, *Leasing*, dan *Konsinyasi*. Banyak lagi perjanjian tak bernama yang dikenal dalam praktek perekonomian dan bisnis di Indonesia. Perjanjian konsinyasi atau yang biasa disebut perjanjian bagi hasil atau bisa juga disebut titip-jual adalah salah satu perjanjian tak bernama yang populer di dunia kerjasama dan bisnis. Para ahli mendefinisikan Konsinyasi sebagai suatu metode transaksi niaga yang dimana didalamnya terdapat sebuah perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak yang berisi penyerahan produk dari produsen (*consignor*) kepada pihak tertentu agar membantu menjualkan kepada konsumen. Jika produk laku terjual, si penyalur (*consignee*) akan mendapatkan komisi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Berikut ini definisi konsinyasi menurut para ahli, diantaranya:³

1. Aliminsyah dan Padji.

³<http://legalstudies71.blogspot.com/2018/12/pengertian-konsinyasi-penjualan.html>, diakses pada tanggal 23 November 2020 Jam 20.34 WIB

Konsinyasi adalah barang yang dikirim untuk dijual di masa depan atau dikonsinyasi dengan pihak ketiga untuk tujuan lain, dan hak atas barang tetap ada pada pengirim. Penerima bertanggung jawab untuk menangani barang sesuai dengan kontrak.⁴

2. Utoyo Widayat

Konsinyasi adalah ketika pemilik menyerahkan atau menahan barang kepada orang lain yang bertindak sebagai distributor/agen penjualan. Kepemilikan barang tetap pada pemilik barang sampai barang tersebut dijual.⁵

3. Sugito

Konsinyasi adalah penyerahan atau penitipan barang oleh pengirim kepada orang lain yang bertindak sebagai distributor/agen penjualan.⁶

4. Tasli

Pengiriman adalah penjualan melalui pihak ketiga, dalam hal ini persediaan barang yang dimiliki diserahkan kepada pihak ketiga (komisioner). Setelah penjualan terjadi, penjual akan menerima jumlah komisi yang disepakati.⁷

5. Allan R. Dreblin

Konsinyasi adalah penyerahan barang secara fisik kepada pihak lain dimana pemilik bertindak sebagai penyalur dan hak hukum atas barang

⁴Aliminsyah. Padji.. “*Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*”. Bandung: Yrama Widya, 2008, hlm.23

⁵Utoyo Widayat, *Akuntansi penjualan : angsuran dan konsinyasi*, Jakarta: lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1991, hlm.13

⁶*Ibid*

⁷<http://legalstudies71.blogspot.com/2018/12/pengertian-konsinyasi-penjualan.html>, diakses pada tanggal 23 November 2020 Jam 20.34 WIB

ada pada pemilik sampai barang tersebut dijual oleh agen penjualan/distributor.⁸

Menurut perkembangannya, perjanjian konsinyasi banyak diadopsi secara luas oleh orang-orang yang beroperasi di perusahaan kecil dan menengah dan perusahaan besar. Kerjasama perjanjian konsinyasi adalah usaha atau bentuk kerjasama yang pelaksanaannya menggunakan metode dimana salah satu pihak memiliki barang/produk yang dia tempatkan dialokasi pihak lainnya, pihak yang ditempati berkewajiban mempromosikan dan menjual barang tersebut dengan berbagai hal macam cara, retail maupun grosir, dan pembayaran baru dilakukan jika barang sudah terjual oleh pemilik tempat dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan dikurangi komisi dari hasil penjualan. Melalui kerjasamanya dengan penjualan konsinyasi tersebut, pemilik barang tersebut pengamanat (*consignor*) dengan pihak yang dititipkan barang tersebut sebagai komisioner. Produk oleh pengamanat disebut sebagai barang konsinyasi, sebaliknya barang yang diterima oleh komisioner disebut barang komisi.

Hubungan hukum antara pemilik produk dengan agen penjualan atau si pemilik tempat dilandaskan atas dasar kesepakatan keduanya yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau kesepakatan lisan, dengan kata lain didasarkan pada dua unsur yang terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Pada hakikatnya hubungan ini legal/sah secara hukum, namun yang tampak dalam kenyataan sehari-hari adalah hubungan kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan pemilik toko yakin bahwa barang dari penyetok akan laku keras di pasaran serta

⁸Allan R. Drebin, *Advanced Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan)*, ahli bahasa oleh Freddy Sarangih, d.k.k, Jakarta: Erlangga, 1991, Cet. Ke-1 hlm.158

akan memberi keuntungan bagi pemilik toko dan juga sebaliknya bagi supplier yang memperoleh keuntungan.

Perihal bentuk serta klausula yang ada dalam perjanjian akan diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian itu, karena pada intinya perjanjian kerjasama dengan sistem konsinyasi ini tidak diatur secara jelas dan gamblang. Ini sesuai dengan ketentuan perihal perikatan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terkhususnya terdapat di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memiliki sistem terbuka dan adanya kebebasan berkontrak.⁹ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan dengan jelas bahwa segala bentuk persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang kepada para pihak yang membuatnya. Ketentuan dalam pasal ini dikenal istilah *Pacta Sunt Servanda*. Kebebasan berkontrak memiliki pemahaman bahwasanya setiap pihak bebas memperjanjikan apa saja dengan syarat tidaklah bertentangan dengan undang-undang, Ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁰ Perihal penyebab dari perjanjian haruslah halal, diatur dalam Pasal 1337 yang menjelaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik ataupun ketertiban umum. Perjanjian konsinyasi ini mengikuti aturan yang termuat didalam Pasal 1319 yang menentukan semua perjanjian, baik yang memiliki nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 13.

¹⁰ *ibid*

Ruang lingkup kajian hukum perjanjian tak bernama atau *innominaat* adalah setiap perjanjian yang muncul dan tumbuh didalam masyarakat.¹¹ Hukum perjanjian *innominat* bersifat khusus, sedangkan hukum perjanjian atau hukum perdata adalah hukum yang bersifat umum, berarti bahwa perjanjian *innominaat* berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Apabila dalam undang-undang khusus tidak diatur maka kita mengacu pada peraturan yang bersifat umum, sebagaimana yang tercantum dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1404 definisi konsinyasi berbunyi :

“Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berhutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkan, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang demikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berhutang dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang”.

Toko Sari Sayur adalah salah satu contoh pelaku usaha yang menerapkan perjanjian konsinyasi dalam memajukan usahanya. Toko Sari Sayur melaksanakan perjanjian dengan *home industry* cacafood secara online yang perjanjian tersebut dibuat berdasarkan prinsip kepercayaan. Jika dikaitkan dengan pengertian perjanjian konsinyasi yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbeda dengan perjanjian konsinyasi antara Toko Sari Sayur dengan *home industrie* cacafood.idn, konsinyasi dalam Kitab Undang-Undang

¹¹ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 23

Hukum Perdata dengan Konsinyasi atau kuasa menjual perjanjian kerjasama antara Toko Sari Sayur dengan *home industrie* cacafood memiliki kemiripan nama akan tetapi mempunyai makna yang berbeda. Perjanjian konsinyasi antara Toko Sari Sayur dengan *home industrie* cacafood adalah suatu bentuk perwujudan baru perjanjian penitipan jual beli, hal ini merupakan suatu langkah penyimpangan terhadap buku III KUH Perdata yang pada dasarnya bersifat *aanvulluend recht* atau hukum pelengkap, yang sifatnya mengatur. Maka perjanjian konsinyasi antara Toko Sari Sayur dengan *home industrie* cacafood tidak diatur secara jelas dan gamblang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi ada didalam kehidupan masyarakat serta lahirnya perjanjian ini dilandasi oleh asas kebebasan mengadakan perjanjian ataupun *partij otonomi* yang berlaku didalam hukum perjanjian.

Perjanjian yang dibuat antara Toko Sari Sayur dengan *home industrie* cacafood memiliki sifat mengikat, yang artinya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mematuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut. Perjanjian konsinyasi membentuk suatu hukum yang berisikan terpenuhinya atau tidaknya hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sampai para pihak sepakat dan setuju untuk mengakhiri perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.

Akan tetapi pada prakteknya timbul permasalahan yang dapat dilihat secara kasat mata, yaitu tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dimana kerap terjadi dalam pelaksanaan kewajiban yang dengan kata lain para pihak ada

dalam keadaan wanprestasi yaitu keadaan yang dimana dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, para pihak tidak dapat melaksanakan prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Toko Sari Sayur dan keterlambatan pengembalian barang sisa yang tidak sesuai dengan perjanjian sehingga makanan tersebut menjadi tidak layak konsumsi adalah bentuk wanprestasi yang terjadi atas perjanjian tersebut. Kemudian permasalahan yang kadang timbul adalah perjanjian yang dibentuk oleh para pihak adalah perjanjian tidak bernama yang dibentuk secara elektronik sehingga bukti yang menjadi pegangan oleh para pihak apabila terjadi permasalahan tidaklah kuat secara hukum. Hal ini terjadi karena pengaturan terkait bentuk perjanjian elektronik di Indonesia sendiri belum secara jelas diatur. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin mengambil skripsi dengan judul:

“WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI (TITIP JUAL) ANTARA ONLINE SHOP CACAFOOD.IDN DENGAN TOKO SARI SAYUR DI KOTA TEGAL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis kemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi Online Shop Cacafood.idn dengan Toko Sari Sayur Di Kota Tegal?
2. Bagaimana penerapan perjanjian konsinyasi antara Online Shop Cacafood.idn dengan Toko Sari Sayur di Kota Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan rumusan masalah, sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi Online Shop Cacafood.idn dengan Toko Sari Sayur di Kota Tegal
2. Untuk mengetahui penerapan perjanjian konsinyasi antara Online Shop Cacafood.idn dengan Toko Sari Sayur di Kota Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, sebagai bahan masukan dan bekal pengetahuan bagi penulis tentang tinjauan hukum terhadap pelaksanaan kuasa menjual antara Toko Sari Sayur dengan *home industrie* cacafood.
2. Bagi akademis, diharapkan dapat memberikan suatu karya penelitian dibidang hukum khususnya terkait penelitian perjanjian lisan penjualan kuasa menjual.
3. Bagi peneliti lain, sebagai sumber informasi dan bahan referensi serta sebagai bahan untuk penelitian lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu bentuk acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian

terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

1. Penelitian oleh Deny Cristian dalam skripsinya yang berjudul “Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana terjadi wanprestasi di Dapur Roti Bu Haryati.

Adapun persamaan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama meneliti wanprestasi dalam sebuah perjanjian konsinyasi atau kuasa menjual. Sedangkan perbedaannya penulisan skripsi diatas membahas perihal penelitian terkait wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi atau kuasa menjual di dapur roti bu haryati, sedangkan skripsi penulis membahas mengenai pelaksanaan perjanjian elektronik antara Toko Sari Sayur sebagai pihak yang dititipkan barang atau yang diberi kuasa menjual dan *home industrie* cacafood sebagai pihak yang menitipkan barang atau yang memberi kuasa menjual.

2. Penelitian oleh I Made Aryawan Saddewa dalam skripsinya yang berjudul “Eksistensi Pengaturan Perjanjian Konsinyasi Dalam Pelaksanaan Penjualan Buku Terbitan Undaya *University Press*”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Eksistensi pengaturannya dalam perjanjian Konsinyasi.

Adapun persamaan dengan skripsi tersebut sama-sama meneliti perjanjian kuasa menjual. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi tersebut meneliti bagaimana pengaturan perjanjian konsinyasi atau kuasa menjual dalam pengaturan yang telah ada, sedangkan penulis meneliti bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian konsinyasi atau kuasa menjual pada Toko sari sayur.

3. Penelitian oleh Ahmad Amirudin dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara *Distributor Outler* (Distro) Dengan Supplier”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan hukum dalam bentuk kontrak kerjasama konsinyasi antara supplier dan distro.

Adapun persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut ialah serupa dalam membahas mengenai perjanjian konsinyasi atau perjanjian kuasa menjual. Yang menjadi pembedanya terdapat dalam objek penelitiannya yang dimana skripsi tersebut objeknya adalah pakaian, sedangkan penelitian skripsi penulis meneliti objek produk makanan yang diproduksi oleh cacafood.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya didalam sebuah penulisan skripsi memerlukan data yang sempurna dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto terdiri dari 2 yaitu¹² penelitian hukum normatif dan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.52

penelitian hukum empiris. Yang mana penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.¹³ Sedangkan penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan efektifitas hukum. Akan tetapi dalam penelitian ini fokus kajian yang akan penulis terapkan adalah penelitian hukum normatif empiris yang mengkaji hukum positif dan hukum tertulisnya serta efektifitas hukumnya. Dalam melakukan penelitian ini agar terlaksana dengan baik dan maksimal, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi penulis disini menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat¹⁴

c. Sumber Data

Penelitian ini mengunakan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

¹³ Soedjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23

¹⁴ *Ibid*

a) Data Primer

Penelitian data yang diperoleh langsung dari lapangan adalah bentuk jenis data primer dalam penelitian ini. Data ini dapat diperoleh melalui observasi secara langsung maupun hasil wawancara kepada narasumber berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui membaca buku-buku literatur, dokumen, dan tulisan yang dianggap peneliti berkenan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode Studi Lapangan (*Field Research*). Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.¹⁵

Metode Kepustakaan adalah metode kedua selain dari metode Studi Lapangan yang penulis juga gunakan. Metode Kepustakaan sendiri adalah metode yang melaksanakan penelitian untuk memperoleh data sekunder yang dilaksanakan melalui beberapa cara,

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta Sinar Grafika, 2002, hlm. 57.

yaitu dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan/ataupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁶

e. Metode Pengolahan Data

Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dan menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan suatu analisis data yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁷

f. Analisis bahan penelitian

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Hasil yang diperoleh dari analisis ini menghasilkan data yang disebut sebagai data deskriptif yaitu data yang diperoleh dari dihubungkannya

¹⁶Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publisng. 2006. hlm. 393.

¹⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, Cet.IV, hlm.158

data satu dengan lainnya, disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian ini agar terperinci, maka harus adanya sistematika pembahasan. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak. Kemudian sistematika selanjutnya yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Membahas perihal latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan. Urutan penulisan pada Bab I sebagai berikut:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematikan Penulisan

Bab II TINJAUAN KONSEPTUAL

Pada bab ini membahas perihal tentang norma hukum, teori hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yang diangkat oleh penulis

dengan memperhatikan variabel penelitian yang termuat dalam judul. Urutan penulisan pada Bab II sebagai berikut:

- A. Tinjauan tentang Perjanjian
- B. Tinjauan tentang Perjanjian Konsinyasi
- C. Tinjauan tentang Wanprestasi
- D. Tinjauan tentang Kerjasama dalam Perjanjian Konsinyasi

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan membahas dan menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya adalah menjelaskan faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian kuasa menjual, kemudian menganalisa penerapan perjanjian tersebut. Urutan penulisan pada Bab III sebagai berikut:

- A. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi Online Shop Cacafood.idn dengan Toko Sari Sayur Di Kota Tegal.
- B. Penerapan perjanjian konsinyasi Online Shop Cacafood.idn dengan Toko Sari Sayur Di Kota Tegal.

Bab IV PENUTUP

Bab IV merupakan kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah. Urutan penulisan pada Bab IV sebagai berikut:

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biodata penulis.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Definisi Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.¹⁸

Selain itu, berikut ini adalah beberapa definisi perjanjian yang diungkapkan oleh para sarjana hukum, antara lain:

1) Subekti

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”¹⁹

2) R. Wirjono Projodikoro

“Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Rajagrafindo Perdasa, 2008, hlm. 63

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2007, hlm. 15.

sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”²⁰

3) R. Setiawan

“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”²¹

4) Abdulkadir Muhammad

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”²²

Melihat dari beberapa pengertian atau definisi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya perjanjian adalah perbuatan hukum yang dilandasi oleh persetujuan para pihak, dimana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh setiap pihak maka akan berlaku pula sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana perjanjian tersebut berlaku layaknya undang-undang dan harus dilaksanakan oleh para pihak, hanya apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah dibuat secara sah.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 2001, hlm. 8

²¹ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, PT Penerbit Djambatan, 2005, hlm. 331-332.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT.Alumni, 2012, hlm. 93.

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Sahnya suatu perjanjian sendiri termuat didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian terdiri atas empat syarat yaitu:

- a) Sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya;
- b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c) Mengenai suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.

Syarat subyektif terletak pada syarat yang pertama dan yang kedua, karena syarat tersebut menyebutkan tentang orang-orang atau subyeknya yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan syarat obyektif terletak di dua syarat terakhir, karena menyebutkan tentang perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²³

Berikut adalah beberapa penjelasan perihal syarat sahnya perjanjian yang termuat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

- a) Sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya

Para pihak wajib dan haruslah ada kata sepakat di dalam hal-hal pokok perjanjian yang mereka sepakati. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara dua pihak, atau dengan perkataan lain ada pertemuan dua kehendak yang berbeda akan tetapi saling mengisi dan masing-masing pihak menyatakan persetujuannya masing-masing. Untuk dapat bertemu, antara kehendak pihak yang

²³ *Ibid*, hlm.73

satu dengan pihak yang lain, maka kehendak tersebut harus dinyatakan.

Sesuai dengan perihal kesepakatan, jika tak ada kesamaan antara pernyataan dan kehendak telah melahirkan teori-teori hukum untuk menyelesaikannya, yaitu :²⁴

1) Teori Kehendak (*Wilttheorie*)

Teori ini merupakan teori yang paling tertua serta lebih banyak menekankan kepada faktor kehendak. Teori ini menyatakan bahwa apabila dalam menyampaikan sebuah pernyataan yang tak sesuai dengan apa yang dikehendaknya, maka pihak yang menyatakan kehendaknya tersebut tidak terikat dengan pernyataan itu. Pasal 1343 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah salah satu bentuk penerapan teori ini yang mana isinya menyebutkan : “Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, dari pada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf.”

2) Teori Pernyataan (*Verklaringstheorie*)

Teori pernyataan menjelaskan bahwa sepakat yang dinyatakan oleh pihak-pihak ialah akan menjadi pengikat para pihak, tanpa memikirkan apakah yang dinyatakan para pihak sama atau tidak

²⁴ Wibowo T. Tunardy, *Teori-Teori yang Digunakan Untuk Menentukan Terjadinya Kesepakatan*, <https://www.jurnalhukum.com/teori-teori-yang-digunakan-untuk-menentukan-terjadinya-kesepakatan/>, diakses pada tanggal 21 November 2019 Jam 16.00 WIB

dengan kehendak masing-masing pihak. Pernyataan ialah tindakan lahiriah yang dapat diketahui, sedangkan kehendak adalah tindakan batin seseorang yang tidak dapat diketahui. Teori ini diterapkan didalam Pasal 1342 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “Jika kata-kata suatu perjanjian adalah jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran”.

3) Teori Kepercayaan (*Vetrouwenstheorie*)

Teori kepercayaan memberitahukan bahwa kata sepakat timbul, apabila terdapat dua atau lebih pernyataan yang saling bertemu dan menimbulkan kepercayaan. Teori ini mendapat penerapan dalam Pasal 1346 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa: “Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di dalam negeri ataupun ditempat dimana perjanjian telah dibuat”.

b) Kecakapan (Pasal 1329-1331 KUHPerdata).

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Namun, KUH Perdata tidak menyebutkan mengenai orang yang cakap membuat perjanjian. Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat perjanjian adalah.²⁵:

²⁵Subekti, *Op.cit*, hlm. 20

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan di dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh undang-undang.

Perihal kedewasaan undang-undang menjabarkan sebagai berikut:

- 1) Di dalam Pasal 330 KUH Perdata dijelaskan bahwa seseorang akan dikatakan dewasa jika telah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin.
- 2) Di dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa cakap hukum bagi seorang pria/lelaki ialah jika dia telah berumur 19 tahun, sedangkan untuk seorang wanita/perempuan jika sudah mencapai umur 16 tahun.

c) Perihal sesuatu hal tertentu

Hal tertentu yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

- 1) Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa suatu pokok perjanjian berupa barang minimal harus tentukan jenisnya.
- 2) Pasal 1332 jo Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa barang yang dapat dijadikan pokok perjanjian hanya barang-barang yang baru aka nada di kemudian hari juga dapat dijadikan pokok perjanjian;

d) Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya suatu perjanjian yang keempat adalah sebab yang halal. Syarat adanya sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan isi atau tujuan perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan undang-undang tidak memperdulikan apapun yang menjadi sebab orang dalam mengadakan perjanjian, yang diperhatikan adalah isi perjanjian itu. Jelas uraian diatas termuat dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. **Macam-Macam Perjanjian**

Berikut ini adalah beberapa macam bentuk perjanjian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu: ²⁶

- a. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa Pasal 1457 KUH Perdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak.

²⁶ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003, hlm. 82.

- b. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Sebagai contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai.
- c. Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan nikmat dari padanya. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah. pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (consensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pengangkutan. Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai. Perjanjian Formil adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli tanah harus dengan akte PPAT. Sebagai contoh jual beli tanah, undang-undang menjelaskan bahwa akta jual beli diwajibkan diadakan dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam KUH Perdata Buku III Bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUH Perdata maupun dalam KUHD. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.

4. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian, harus benar-benar dibedakan daripada hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya pada perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga, maka perikatan pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hapusnya perjanjian atau perikatan, bisa dilakukan dengan:²⁷

- a) Pembayaran
- b) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan tau penitipan
- c) Pembaharuan Hutang

²⁷ *Ibid*, hlm.163

- d) Perjumpaan Hutang atau Kompensasi
- e) Percampuran Hutang
- f) Pembebasan Hutangnya
- g) Musnahnya barang yang terhutang
- h) Kebatalan atau Pembatalan
- i) Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini
- j) Lewatnya Waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

5. Asas-Asas Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian telah mengenal beberapa asas-asas hukum di dalamnya. Asas hukum itu sendiri adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap hukum yang terjelma dalam peraturan perundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat hukum dan peraturan yang konkrit tersebut.²⁸ Adapun asas-asas umum hukum dalam perjanjian tersebut antara lain:

a. Asas Konsualisme

Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku

²⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Peraturan)*, Bandung: Alumni, 1994, hlm.33

pada perjanjian formal. Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu, misalnya perjanjian Jual Beli Tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam Akta PPAT. Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah sudah terpenuhi tindakan-tindakan formal dimaksud.²⁹ Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat dapat secara lisan maupun secara tertulis berupa akta jika dikehendaki sebagai alat bukti.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang membebaskan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan pelaksanaan serta persyaratan dalam menentukan bentuk perjanjian yang tertulis dan lisan.³⁰ Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak di tuangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam hubungan kontraktual diantara para pihak. Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUPerdata.

c. Asas Personalia

Asas ini termuat didalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat

²⁹R. Subekti, *Op.cit.* hlm. 15

³⁰Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 9

mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Pasal itu dengan gamblang menyebutkan bahwa pada prinsipnya sesuatu perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak dalam.kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.³¹ Secara spesifik ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memaparkan kepada kedudukan dalam bertindak sebagainya individu pribadi sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, yang mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.

d. Asas daya mengikat kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat perjanjian, terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Dalam rumusan Pasal 1338

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal tersebut menyatakan bahwa undang-undang melihat posisi para pihak kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang dan undang-undang sendiri mengakuinya.³²

e. Asas itikad baik

³¹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.14-15

³² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta:Kencana, 2010, hlm. 127.

Asas ini termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang menyebutkan bahwa ” perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas yang dimana para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.³³

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Konsinyasi

1. Pengertian Perjanjian Konsinyasi

Saat ini didalam dunia perdagangan memang ada bermacam-macam kendala dan cara untuk memperdagangkan segala hal, pada kesehariannya jumlah calon pelanggan maupun pelanggan pada suatu wilayah adalah berbeda dan terbatas adanya, banyak cara dalam meningkatkan penjualannya, salah satunya dengan memperluas daerah pemasarannya, selain itu ada juga dengan cara meningkatkan volume penjualan dengan sistem penjualan cicilan, konsinyasi, hingga agen ataupun cabang. Pada kali ini akan membahas lebih kepada sistem konsinyasi khususnya pada perjanjian konsinyasi.

³³Subekti, *Op.cit*, hlm. 12

Perjanjian konsinyasi adalah suatu bentuk perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki sejumlah barang menyerahkan barang tersebut kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini pihak atau orang yang menyerahkan barang (pemilik barang) disebut sebagai konsinyor, sementara pihak atau orang yang menerima barang serahan dari pemilik tadi ialah disebut sebagai konsinyi. Dalam proses ini barang yang dititipkan oleh konsinyor kepada konsinyi disebut barang konsinyasi.

Dalam kepustakaan hukum perjanjian, terdapat banyak pendapat yang membagi perjanjian kedalam perjanjian bernama (*Nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*Innominaat*). Yang dinamakan dengan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUH Perdata, mulai dari Bab V tentang Jual Beli sampai dengan Bab XVIII tentang Perdamaian, sedangkan yang disebut dengan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata. Dalam praktek dunia usaha dewasa ini dikenal adanya berbagai macam perjanjian yang tidak dapat kita temukan dalam KUH Perdata, misalnya perjanjian mengenai sewa guna usaha, hak opsi leasing, perjanjian titip jual (konsinyasi), bangun-pakai-serah, dan masih banyak lagi.

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, bahwa pembagian perjanjian kedalam perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama tidak banyak memberikan banyak arti, oleh karena perbedaan tersebut

pada hakekatnya tidak menyentuh pada konsep maupun suatu konsepsi tertentu yang dapat dipergunakan secara konsisten.³⁴

Dalam hal ini, suatu perjanjian konsinyasi termasuk dalam suatu perjanjian tidak bernama, hal ini dikarenakan perjanjian konsinyasi ini muncul, tumbuh serta berkembang dalam masyarakat itu sendiri dan juga belum dikenal didalam KUH Perdata, dan perjanjian konsinyasi ini memiliki dasar berlakunya yaitu asas kebebasan berkontrak.³⁵

Perjanjian konsinyasi ialah termasuk dalam jenis perjanjian *innominaat* (tidak bernama) dan jenis perjanjian *innominaat* ini memiliki pengaturan di dalam Buku III KUH Perdata. Di dalam buku III KUH Perdata, hanya ada satu Pasal yang mengatur tentang kontrak *innominaat* ini, yaitu pada Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam Bab ini dan Bab yang lalu.”³⁶ Dalam penjelasan ini tegas menjelaskan bahwa suatu perjanjian *innominaat* walaupun tidak dikenal atau tak bernama tetaplah harus tunduk akan peraturan umum perjanjian dalam KUH Perdata. Pada dasarnya perjanjian titip jual yang dikenal dengan istilah perjanjian konsinyasi ini memiliki dasar berlaku dalam KUH Perdata secara terpisah, yang mana perjanjian konsinyasi ini memiliki unsur jual beli yang mengambil dasar pada Pasal 1457-1460 KUH Perdata, dan juga disertai

³⁴Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir Dari Perjanjian*, Ed. I, Cet.II, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.83

³⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet.6, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.28

³⁶ *Ibid*, hlm.5

dengan suatu bentuk perjanjian penitipan yang menggunakan dasar hukum pada Pasal 1694-1739 KUH Perdata, dengan demikian suatu perjanjian konsinyasi juga memiliki unsur essensialia yaitu pada perjanjian jual beli yang merupakan suatu persetujuan dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik dan menjaminkannya pembeli mengikatkan diri untuk membayar sesuai harga yang diperjanjikan sebelumnya

2. Syarat Perjanjian Konsinyasi

Syarat perjanjian konsinyasi dalam prakteknya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan syarat perjanjian-perjanjian pada umumnya yang tertuang dalam Pasal 1320, yaitu:

- a. Kesepakatan
- b. Kecakapan bertindak
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

3. Dasar Hukum Perjanjian Konsinyasi

Dasar hukum dari konsinyasi adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian konsinyasi tersebut. Hal ini

disebabkan karena konsinyasi adalah merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah apa yang menjadi dasar hukum konsinyasi yaitu perjanjian. Apabila membicarakan perjanjian, terlebih dahulu diketahui apa sebenarnya perjanjian itu dan dimana dasar hukumnya. Perjanjian yang dimaksudkan adalah perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang berjudul tentang perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus.

Adapun yang dimaksudkan dengan perikatan oleh Buku III KUH Perdata itu adalah: Suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberikan kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.³⁷

Perikatan, yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus itu, mengatur tentang persetujuan-persetujuan tertentu yang disebut dengan perjanjian bernama, artinya disebut bernama karena perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembuat undang-undang, dan di samping perjanjian bernama juga terdapat perjanjian yang tidak bernama, yang tidak diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian sewa beli dan lain sebagainya.

³⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Selanjutnya disingkat R. Subekti, I), Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, cet-5, 2004, hlm. 101

“Perjanjian atau verbinten is mengandung pengertian suatu hubungan hukum/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.”³⁸

Perikatan seperti yang dimaksudkan di atas, paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa ini paling tepat dinamakan perjanjian yaitu suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji. Dapat dikonstatir bahwa perkataan perjanjian sudah sangat populer di kalangan rakyatl.³⁹

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena undang-undang, maupun karena adanya suatu perjanjian. Dengan demikian maka harus terlebih dahulu adanya suatu perjanjian atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dan undang-undang itu merupakan sumber suatu ikatan. Dasar hukum dari persetujuan adalah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan sumber perikatan yang lahir karena undang-undang dapat dibagi dua pengertian yaitu undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan orang. Karena undang-undang saja misalnya kewajiban atau hak orang tua terhadap anak, dan sebaliknya kewajiban anak terhadap orang tua apabila orang tua tidak berkemampuan.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, cet-3, 2003, hlm. 6

³⁹ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (selanjutnya disingkat R. Subekti, II), Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm. 12.

Undang-undang karena perbuatan orang dapat dibagi dalam dua pengertian yaitu perbuatan yang diperbolehkan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum. Yang diperbolehkan undang-undang misalnya: mengurus harta orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang merugikan orang lain.

Perikatan yang dilahirkan karena undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan orang, bukanlah merupakan perjanjian karena kedua macam perikatan tersebut tidak mengandung unsur janji. Dimana seseorang tidak dapat dikatakan berjanji hal sesuatu, apabila sesuatu kewajiban dikenakan kepadanya oleh undang-undang belaka atau dalam hal perbuatan melawan hukum secara bertentangan langsung dengan kemauannya. Dalam hal ini akan difokuskan diri pada perikatan yang bersumberkan pada persetujuan atau perjanjian.

Perihal hukum perjanjian sebagai termuat dalam Buku III KUH Perdata yang berjudul tentang perikatan, yang keseluruhannya terdiri atas delapan belas bab (bab I sampai dengan bab XVIII). Bab I sampai dengan IV mengatur tentang :

- I : Perikatan pada umumnya
- II : Perikatan yang lahir dari perjanjian
- III : Perikatan yang lahir dari undang-undang
- IV : Mengatur tentang hapusnya perikatan

Sedangkan Bab V sampai dengan Bab XVIII mengatur tentang perjanjian-perjanjian khusus yang merupakan tipe-tipe dari perjanjian-perjanjian yang selalu terjadi dalam masyarakat, dan lajim disebut perjanjian bernama. Kalau diperhatikan dari hal perikatan dalam Buku III antara yang diatur pada Bab I sampai dengan Bab IV adalah mengatur tentang pokok-pokok perikatan, sedangkan bab V sampai dengan Bab XVIII memuat pembahasan lebih lanjut, kadang-kadang pengulangan dari bahagian umum. Jadi bahagian umum dari Buku III tersebut pada dasarnya berlaku terhadap semua perjanjian, baik bernama maupun yang tidak bernama.

Misalnya : Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat sahnya perikatan, haruslah diberlakukan pada semua perjanjian yang ada dalam Bab V sampai Bab XVIII. Dengan demikian melihat uraian singkat tersebut diatas nyatalah berlainan dengan sistem tertutup, sebagaimana yang dianut dalam Buku ke- Dua KUH Perdata, dimana para pihak tidak menentukan lain, selain yang telah ditentukan dalam undang-undang.

C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Definisi wanprestasi berasal dari bahasa Belanda wanprestatie yang artinya prestasi buruk (kealpaan/kelalaian) wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan karena kesalahan atau kelalaian debitur yang menyebabkan debitur itu berhalangan untuk melakukan atas prestasinya.

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Adanya macam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpangsiuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang masih tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya berpendapat bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.⁴⁰

R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

⁴⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 2001, hlm. 17.

- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.⁴¹

Dari definisi-definisi di atas maka apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Sehingga jika disimpulkan maka kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Dalam pelaksanaan perjanjian terkadang prestasi yang diperjanjikan tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya prestasi dalam sebuah perjanjian dapat terjadi karena dua (2) kemungkinan, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur sengaja maupun tidak sengaja.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu merupakan hal-hal diluar kemampuan debitur.

Dalam Buku III KUH Perdata, didalamnya berisikan tentang wanprestasi yang diatur dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 1238 KUH Perdata:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

⁴¹Subekti, *Op.cit*, hlm.50

Pasal 1243 KUH Perdata:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Kedua pasal tersebut jelas membuktikan bahwa KUH Perdata menjadi dasar hukum yang kuat dalam hukum perdata.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

J. Satrio mengatakan bahwa wanprestasi memiliki bentuk-bentuknya sendiri, yaitu sebagai berikut ini:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁴²

Sedangkan Subekti dalam bukunya menjelaskan bahwa ada empat bentuk waprestasi, yaitu:

⁴²J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, cet-3, 2002, hlm. 84

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴³

Di dalam masyarakat sendiri atau secara praktik tidak mudah dapat menetapkan seseorang telah melakukan wanprestasi. Hal ini terjadi karena seringkali dalam suatu perjanjian tidak diperjanjikannya dengan pasti kapan salah satu pihak diharuskan untuk melakukan prestasi dalam menentukan saat terjadinya wanprestasi diperlukan adanya suatu penetapan lalai atau *somatie* (teguran) atau *ingerbrekestelling*.

Menurut Pasal 1238 KUH Perdata sebagaimana disebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdata adalah:

- a. Surat perintah. Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru Sita”

⁴³*Ibid*, hlm.84

- b. Akta. Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta Notaris

Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi. Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

3. Kerjasama dalam Perjanjian Konsinyasi

Seperti yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa suatu perjanjian memiliki subyek dan obyek perjanjian, maka dalam hal ini kerjasama dalam perjanjian konsinyasi juga memiliki pihak-pihak dalam perjanjian konsinyasi itu sendiri, yang mana pada umumnya subyek perjanjian itu ialah dapat berupa manusia dan atau badan hukum, terdapat pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian adalah satu pihak yang berhak atas suatu prestasi dan satu pihak lainnya adalah yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Sebagai contoh, subyek hukum dalam kerjasama perjanjian konsinyasi Toko Sari Sayur dengan *home industrie* cacafood ialah:

- 1) Pihak Toko Sari Sayur adalah *owner* atau pemilik dari toko tersebut.
- 2) Pihak *home industrie* cacafood adalah *owner* atau pemiliknya.

Dengan demikian maka para pihak-pihak dalam perjanjian diataslah yang akan melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam suatu perjanjian yang dibuat. Para pihak dalam kerjasama perjanjian konsinyasi dituntut untuk saling menjaga dan mematuhi hak dan kewajiban masing-masing. Menurut Hadori Yunus dan dan Harnanto hak dan kewajiban dari pihak konsinyi dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁴

a. Hak-hak Konsinyasi

- a) Konsinyi berhak mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut, sesuai dengan jumlah yang diatur dalam perjanjian diantara dua pihak.
- b) Dalam batasan-batasan tertentu biasanya kepada konsinyi diberikan hak untuk memberikan jaminan terhadap kualitas barang yang dijualnya.
- c) Untuk menjamin pemasaran barang yang bersangkutan konsinyi berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada langganan seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang-barang yang sejenis, meskipun pengamanat dapat mengadakan pembatasan-pembatasan yang harus dinyatakan dalam perjanjian.

b. Kewajiban-kewajiban konsinyi

⁴⁴ Hadori Yunus dan Harnanto, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Yogyakarta: BPPE S Manggala.2011, hlm. 144.

- a) Melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima dari pihak konsinyor.
- b) Mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang-barang milik konsinyor sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian.
- c) Mengelola secara terpisah baik dari segi fisik maupun administrasi terhadap barang-barang milik konsinyor, sehingga identitas barang-barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat.
- d) Membuat laporan secara periodik tentang barang yang diterima, barang-barang yang berhasil dijual dan barang-barang yang masih dalam persediaan serta mengadakan penyelesaian keuangan seperti dinyatakan dalam perjanjian.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Perjanjian kuasa menjual atau konsinyasi tak serupa dengan perjanjian baku pada umumnya disebabkan pada perjanjian konsinyasi atau titip jual ini pihak toko sari sayur sebagai penjual barang yang dititipkan oleh pihak cacafood.idn yang menitipkan barang untuk dijual dapat dengan bebas membuat isi daripada perjanjian yang mereka inginkan beserta dengan hak dan kewajiban para pihak atau membuat perjanjian sesuai dengan kebutuhan masing-masing, kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak itulah yang dapat menjadi hukum yang berlaku untuk mereka. Sama halnya pada saat penulis mewawancarai owner toko sari sayur Orion Manihuruk yang mengatakan bahwa, pihaknya dengan pihak cacafood.idn pihak yang akan menjadi penyetok produknya untuk dijualkan di toko sari sayur dalam proses perjanjian antara keduanya tidak ada perjanjian dalam bentuk tertulis akan tetapi secara lisan atas dasar rasa percaya dan itikad baik. Akan tetapi sesuai dengan penuturan Salsabila owner cacafood.idn bahwa pihaknya melakukan perjanjian konsinyasi tersebut karena memang sudah kenal dekat dengan pemilik sari sayur selain dengan pihak sari sayur pihaknya menerapkan perjanjian konsinyasi secara tertulis.

Melalui wawancara dengan Salsabila atau yang sering dipanggil dengan caca, menerangkan bahwa cacafood.idn adalah Usaha Mikro Kecil

Menengah dikota Kuningan yang memproduksi beragam cemilan kering premium (babycrab, chicken skin, kripka, usus crispy) dan tradisional Sunda diantaranya Cireng, Cimol, baso Aci tulang rangu juga banyak cemilan lainnya, yang membedakan cacafood.idn dengan merek lain adalah, cacafood.idn non MSG dan pengawet. Pemilik dari Usaha Mikro Kecil Menengah ini sendiri adalah ibu Salsabila yang pada saat ini telah berusia 22 Tahun. Usaha Kecil Mikro Menengah atau UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro Menengah. Usaha Mikro Kecil Menengah ini beralamatkan di Jl. RE Martadinata No 63a Ancaran, Kuningan, Jawa barat. Berikut ini beberapa daftar harga dari produk cacafood.idn sesuai dengan penuturan dari ibu Salsabila:

1. Cireng ayam pedas jumbo isi 5 Rp 20.000 harga reseller Rp 15.000
2. Cireng ayam original jumbo isi 5 Rp 20.000 harga reseller Rp 15.000
3. Cireng ayam pedas mini isi 10 Rp 20.000 harga resellerRp 15.000
4. Cireng ayam original mini isi 10 Rp 20.000 harga reseller Rp 15.000
5. Risol ayam pedas jumbo isi 5 Rp 20.000 harga reseller Rp 15.000
6. Risol ayam original jumbo isi 5 Rp 20.000 harga reseller Rp 15.000
7. Cimol cabe merah Rp 15.000 harga reseller Rp 10.000
8. Cimol cabe hijau Rp 15.000 harga reseller Rp 10.000
9. Cacacrab Rajungan 200gr Rp 30.000 harga reseller Rp 25.000

10. Piscok Moza Rp 20.000 harga reseller Rp 17.500
11. Bacitul Rangu Rp 25.000 harga reseller Rp 21.000
12. Usus Crispy 200gr Rp 30.000 harga reseller Rp 25.000
13. Singkong Kaca 160gr Rp 20.000 harga reseller Rp 15.000
14. Crispy Chicken Sin 200gr Rp 30.000 harga reseller Rp 25.000
15. Seblak Kampung Rp 20.000 harga reseller Rp16.000
16. Siomay Kering Rp 20.000 harga reseller Rp 15.000

Recomended & best seller

Pembelanjaan reseller diatas 500.000 sekali transaksi dapat 1 point. 1 point = free 1 prodak bebas pilih sesuai stock

Note : Pengambilan awal reseller luar kota min 35 pack, kota Kuningan 20 pack.

Sedangkan toko sari sayur sendiri adalah toko klontong yang berjualan sayuran sembako dan produk-produk lain. Toko sari sayur sendiri beralamatkan di jalan Gatot Subroto No. 58 RT 09/RW 01 Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana Kota Tegal. Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik toko sari sayur Orion Manihuruk mengatakan bahwa beliau melakukan kerjasama dengan cacafood.idn dengan alasan produk-produk cacafood.idn memiliki kualitas yang baik dan branded yang sudah dikenal banyak orang. Selain alasan tersebut, beliau juga mengatakan bahwa dia melakukan kerjasama karena owner atau pemilik dari cacafood.idn adalah kenalan beliau.

Penulis simpulkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak atas asas kepercayaan dimana kedua-duanya hanya berlandaskan rasa percaya antara satu dengan yang lain. Dimana didalam implementasi asas ini setiap pihak saling percaya bahwa mereka akan saling memenuhi prestasi yang telah mereka sepakati sebelumnya. Seperti yang dituturkan oleh Orion Manihuruk selaku owner/pemilik toko Sari sayur menyatakan bahwa “hanya beberapa barang-barang saja yang ada di toko yang dititip jualkan dengan menggunakan perjanjian tertulis, sisanya menggunakan perjanjian secara lisan karena kebanyakan yang nitip disini teman sendiri seperti produk dari Cacafood.idn”.

Klausa perjanjian dari perjanjian lisan konsinyasi antara para pihak menerapkan sistem terbuka, yang artinya bahwa segala ketentuan yang Cacafood.idn setuju dengan Toko Sari Sayur adalah aturan perihal hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi klausa perjanjian konsinyasi tersebut juga membahas dengan aturan pemberian beban ganti rugi serta nominal yang harus dibayarkan oleh para pihak. Ganti rugi akan diberikan kepada setiap pihak bila tidak melakukan kewajibannya atau dengan sengaja bertindak ingkar janji. Akan tetapi, wawancara dengan bapak orion menuturkan bahwa sebelum menempuh jalur hukum akan diadakan pembicaraan dengan semua pihak .

Kata sepakat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah salah satu syarat yang telah terpenuhi dalam membentuk suatu perjanjian, meskipun dalam prakteknya tidak selamanya para pihak dapat

menjalankan prestasinya sesuai dengan isi dalam perjanjian didalamnya. Seperti yang dituturkan oleh pihak cacafood.idn yang menyatakan bahwa “Pihak Toko Sari Sayur mengingkari janji bahwa akan membayarkan keuntungan dalam setiap 1 bulan sekali. Akan tetapi pada prakteknya pihak Toko Sari sayur terkadang akan membayarkan keuntungan tersebut dengan waktu yang tidak sesuai dengan perjanjian. Pihak Toko Sari Sayur sendiri berdalih bahwa ingkar janji tersebut dikarenakan kondisi cuaca yang tidak mendukung. Sehingga konsumen yang ingin membeli produk Cacafood.idn dengan berkunjung langsung ke toko terhalang oleh cuaca. Akan tetapi disini pihak Toko Sari Sayur juga mengatakan bahwa pihak Cacafood.idn telah lalai dalam memberi informasi kenaikan harga yang terjadi selama perjanjian konsinyasi ini berlaku. Pihak cacafood mengatakan lalainya mereka dalam memberikan informasi mengenai kenaikan harga produk, memang terjadi karena kesalahan individu dan ibu salsabila selaku owner atau pemilik sudah meminta maaf secara langsung.

Perjanjian Konsinyasi antara pihak toko sari sayur dan pihak cacafood.idn yang dilakukan secara lisan menyatakan bahwa Pihak Cacafood.idn disini adalah pihak yang memberi kuasa haruslah dapat memenuhi jumlah stock barang dan membawa freezer sendiri dengan ketentuan freezer yang sudah berstiker Cacafood.idn. Tentang peletakan freezer itu diolah sendiri oleh pihak Toko Sari Sayur.

Klausula pokok perjanjian lisan dalam perjanjian itu juga membahas perihal pembagian royalti yang dimana Cacafood.idn menitipkan

produknya kepada pihak Toko Sari Sayur dengan nominal harga Rp. 15.000.- yang dijual kepada konsumen Rp. 20.000.- untuk produk olahan ayam dan Rp.25.000.-, yang akan dijual kepada konsumen Rp. 30.000 untuk produk olahan kepiting. Harga yg diatur oleh pihak Toko Sari Sayur mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pihak Cacafood.idn dan disepakati bersama. Cacafood.idn sendiri mempunyai beberapa varian, yaitu: siomay, nugget ikan, nugget ayam, kaki naga, otak-otak, keong, bakso dan lumpia yang setiap produk memiliki bobot 250 gram. Semua produk Cacafood.idn memakai sistem perjanjian konsinyasi atau kuasa menjual.

Apabila terdapat perubahan dari harga produk, pihak Cacafood.idn wajib menginformasikannya kepada pihak toko sari sayur melalui surat pemberitahuan. Sebab utama perubahan harga adalah:

a. Inflasi biaya

Perusahaan sering menaikkan harga lebih besar dari kenaikan harga dalam rangka berjaga-jaga kalau ada kenaikan biaya lagi;

b. Kelebihan permintaan (*overdemand*)

Maka dari itu untuk mengimbangi kenaikan biaya, perusahaan dapat menaikkan harga dengan berbagai cara salah satunya dengan menaikkan harga penjualan.

Perjanjian tersebut juga membahas tentang proses penyetoran yang diadakan setiap 2(dua) minggu sekali, pembersihan freezer dilakukan setiap hari rabu dan sabtu dalam kurun waktu 1(satu) minggu, proses

penagihan yang dimana setiap per satu atau paling banyak 2(dua) nota di hari yang di tentukan Toko Sari Sayur sendiri dan pembagian keuntungan yang diatur dalam kerjasama konsinyasi antara para pihak yaitu melalui akumulasi dari 1 bulan penjualan sebagaimana yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pembayaran akan dilakukan pada saat dilakukan penghitungan terhadap barang pada bulan ketiga atau batas waktu perjanjian yang ditentukan terhadap barang yang laku saja.

Perjanjian konsinyasi antara toko Sari Sayur dan online shop Cacafood.idn adalah gabungan dari dua macam perjanjian, ialah perjanjian jual beli dan perjanjian penitipan (konsinyasi). Perjanjian jual beli termasuk ke dalam bentuk perjanjian yang bernama (*nominaat*) yang termuat didalam Pasal 1457-1540 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian perjanjian penitipan (konsinyasi) ialah bentuk perjanjian yang tidak bernama (*innominaat*), perjanjian ini berasal dan tumbuh besar didalam masyarakat serta belum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Penitipan barang yang dilakukan antara Cacafood.idn dengan Toko Sari Sayur sendiri sudah tepat dengan peraturan yang ada di dalam Pasal 1701 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian penitipan barang dengan sukarela hanyalah bisa timbul antara setiap orang yang memiliki kecakapan guna mengadakan suatu perjanjian. Implementasi perjanjian yang diadakan oleh Cacafood.idn dan Toko Sari

Sayur pada hakikatnya telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian. Baik ketika mengadakan/membuat klausula atau isi dari perjanjian, maupun saat penyerahan barang.

B. Pembahasan

1. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Online Shop Cacafood.idn dengan Toko Sari Sayur Di Kota Tegal

Wanprestasi adalah suatu kondisi dimana pihak pertama tidak melakukan prestasi yang telah diatur dalam suatu kontrak yang disebabkan terdapat faktor kesengajaan atau kelalaian dan adanya keadaan yang memaksa (*overmacht*) pada pihak pertama.⁴⁵ Pihak pertama/pihak Sari sayur berkewajiban memelihara, mempromosikan, menjual, dan mengembalikan produk yang tidak terjual. Pihak kedua/pihak cacafood.idn berkewajiban untuk membayar komisi dan menyerahkan stock produk. Hal itu adalah bentuk hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang tertuang secara lisan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki akibat hukum di dalamnya bagi mereka pihak-pihak yang lalai dalam melaksanakan prestasi atau yang disebut dengan wanprestasi dalam perjanjian. Jelas hal ini pun berlaku dengan perjanjian konsinyasi sebab perjanjian apapun, baik yang bernama ataupun tidak bernama selalu tunduk terhadap peraturan yang

⁴⁵ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. II, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 340.

berlaku, yaitu pada Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya didalam implementasi perjanjian konsinyasi ini haruslah tunduk terhadap hukum positif yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jikalau didalam perjanjian itu tidak ada yang mengaturnya.

Adapun didalam suatu perjanjian memiliki dua faktor yang memungkinkan penyebab terjadinya wanprestasi ialah faktor dengan sengaja yang dimaksud disini dengan sengaja tidak memenuhi prestasi, yang kedua ialah factor memaksa, dimana ini adalah factor yang menyatakan para pihak dalam perjanjian tidak akan dikatakan tidak bersalah jika sedang berada didalam keadaan memaksa atau diluar dari batas kemampuan para pihak. Serupa pula dengan faktor wanprestasi yang dilakukan dalam perjanjian konsinyasi. Berikut ini adalah beberapa bentuk wanprestasi yang ada didalam perjanjian itu, yaitu berupa:

1. Tidak melaksanakan prestasinya sama sekali.
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat pada waktu.
4. Melaksanakan perbuatan tetapi yang dilarang dalam perjanjian.⁴⁶

Di dalam perjanjian konsinyasi sebab terjadinya wanprestasi ialah ada beberapa hal yaitu berupa keadaan memaksa dimana keadaan tersebut diluar dari kuasa para pihak yaitu Toko Sari Sayur serta kelalaian para pihak. Tidak melaksanakan perjanjian sebagai mestinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan adalah bentuk dari wanprestasi. Dalam hal ini

⁴⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsifat, Teori, Dogmatik, dan Praktek Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, cet. II, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm. 338.

implementasi isi dari perjanjian tersebut selalu dilaksanakan oleh pihak Toko Sari Sayur tapi dalam pelaksanaan tidak sesuai atau terjadi perubahan oleh sebab suatu hal yang menyebabkan ketantuan itu tidak bisa dilaksanakan sebagaimana harusnya.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada bagian hasil penelitian yang menjelaskan bahwa kedua belah pihak telah lalai dalam melaksanakan isi dari perjanjian yang disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama keadaan cuaca yang tidak mendukung sehingga omzet penjualan toko sari sayur menurun bahkan tidak ada penjualan. Yang kedua faktor lupa atau lalai dalam meningkatkan kenaikan harga kepada pihak toko sari sayur.

Melalui analisa penulis, faktor penyebab kedua pihak lalai dalam melaksanakan perjanjian tersebut terdiri dua hal yang pertama kelalaian karena keadaan memaksa/*overmacht*, maksudnya disini adalah faktor-faktor yang terjadi bukan atas kehendak dari kedua belah pihak, seperti terjadinya bencana alam, pencurian dan cuaca yang tidak mendukung sehingga konsumen sulit untuk berkunjung dan membeli produk cacafood. Akibat dari keadaan memaksa atau *overmacht* adalah bahwa pihak kreditur atau dalam kasus ini adalah pihak cacafood.idn tidak dapat meminta pemenuhan prestasi karena tidak masuk dari salah satu unsur wanprestasi, debitur atau disini adalah pihak sari sayur tidak dapat lagi dinyatakan lalai, resiko tidak beralih kepada pihak sari sayur. Meskipun perjanjian yang diterapkan oleh kedua belah pihak adalah dalam bentuk perjanjian lisan, akan tetapi jika ada keadaan memaksa dalam pelaksanaannya maka para

pihak tidak perlu bertanggungjawab akan hal tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 1708 yang berbunyi:

“Penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai mengembalikan barang titipan itu. Dalam hal terakhir ini ia tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang itu, jika barang itu akan musnah juga sekiranya berada di tangan pemberi titipan”

Overmacht juga memiliki unsur-unsur yakni:

1. Peristiwa yang memusnahkan benda yang menjadi obyek perikatan;
2. Peristiwa yang menghalangi Debitur berprestasi;
3. Peristiwa yang tidak dapat diketahui oleh Kreditur/Debitur sewaktu dibuatnya perjanjian.

Sehingga jika penulis coba analisa dari unsur-unsur tersebut pihak sari sayur dapat dikatakan lalai dalam melaksanakan perjanjiannya karena keadaan memaksa dilatarbelakangi oleh cuaca yang ekstrim didaerahnya sehingga konsumen tidak dapat datang untuk berbelanja di tokonya. Hal ini tertuang dalam unsur nomor 1 dan 2 diatas.

Yang kedua kelalaian akibat kehendak dari para pihak, seperti lupa dan tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Yang kedua ini adalah bentuk wanprestasi yang paling umum sering terjadi dimasyarakat. Wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian konsinyasi tersebut diatas penyelesaiannya dapat dilakukan dengan jalur hukum maupun secara kekeluargaan.

Akan tetapi meskipun terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian titip jual antara pihak toko sari sayur dengan pihak cacafood.idn, keduanya

menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa jalur hukum akan tetapi jalur musyawarah dengan ditengahi oleh pihak ketiga yaitu ketua RT yang ada didaerah toko sari sayur, yang kebetulan saat adanya permasalahan tersebut sedang berbelanja di toko sari sayur.

2. Penerapan Perjanjian Konsinyasi antara Online Shop Cacafood.idn dengan Toko Sari Sayur di Kota Tegal

Perjanjian penitipan barang atau perjanjian titip jual toko sarisayur dengan pihak cacafood.idn menurut penulis adalah bentuk perjanjian timbal balik, karena penitipan barang ini merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Dalam perjanjian penitipan barang antara pihak toko sari sayur dengan pihak cacafood.idn yang menjadi subjeknya adalah kedua pemilik masing-masing usaha. Pihak pertama diwakili oleh Salsabila selaku pemilik Online Shop antara cacafood.Idn disebut sebagai dan pihak kedua diwakili oleh Orion selaku pemilik Toko Sari sayur. Pasal 1320 menjelaskan bahwa syarat sahnya perjanjian terdiri dari 4 hal yaitu kata sepakat, cakap dalam berbuat hukum, ada objek yang diperjanjikan dan terakhir objek yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan undang-undang serta norma-norma sosial. Perjanjian Konsinyasi ini dilakukan antara individu yaitu antara Online Shop antara cacafood.idn dan Toko Sari sayur. Subjek dalam perjanjian kerjasama konsinyasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1701 KUH Perdata bahwa perjanjian penitipan barang

dengan sukarela hanyalah dapat terlaksana di antara orang-orang yang memiliki kecakapan hukum guna membuat perjanjian-perjanjian.

Objek yang terdapat di perjanjian ini adalah berbentuk barang yang bergerak berupa frozen food. Serupa di dalam Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian”. Kemudian dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat atau bisa dihitung atau ditentukan”. Menurut R.M. Suryodiningrat yang menyebutkan bahwa setiap bagian-bagian persetujuan yang wajib ada didalam perjanjian, dimana dalam perjanjian penitipan salah satunya adalah unsur esensialia, ialah unsur perjanjian yang pasti harus ada didalam perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada.⁴⁷ Objek yang terdapat diperjanjian konsinyasi Online Shop antara cacafood.idn dan Toko Sari sayur adalah barang bergerak berupa produk frozen food telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Pasal 1332 KUH Perdata bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Hal ini serupa dengan azas perjanjian tentang beberapa hal tertentu, bahwa peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa semata-mata barang yang bisa diperjualbelikan saja yang bisa berperan di dalam pokok

⁴⁷ R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung: Tersito, 2003, hlm. 8

perjanjian. Berikutnya disebutkan bahwa barang tersebut harus suatu barang yang paling sedikit bisa ditentukan jenisnya. Jadi suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah paling sedikit ditentukan jenisnya, atau asalkan kemudian jumlahnya dapat ditentukan atau dapat dihitung. Sebab apabila suatu objek perjanjian tidak tertentu, yaitu tidak jelas jenisnya dan tidak tentu jumlahnya, perjanjian yang demikian adalah tidak sah.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan yang dimaksud ialah guna menimbulkan akibat hukum, yaitu melahirkan hak dan kewajiban, oleh karenanya jika kesepakatan itu tidak dilaksanakan dengan baik maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi untuk si palanggar⁴⁸ Perjanjian Konsinyasi yang dilakukan oleh pihak Cacafood.idn dan pihak Toko Sari sayur berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban diantara keduanya. Hal ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut: Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri". Pasal 1728 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

"Orang yang menitipkan barang diwajibkan mengganti kepada si penerima titipan segala biaya yang telah dikeluarkan pada si penerima titipan segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dititipkan, serta mengganti

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 98

kepadanya semua kerugian yang disebabkan karena penitipan itu.”

Perjanjian Kerjasama titip jual melalui Online Store yang dilakukan oleh Cacafood.idn dan Toko Sari sayur telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 1706 dan 1728 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini karena dalam perjanjian yang para pihak buat telah terkandung hak dan kewajiban perihal penitipan barang. Sesuai pula dengan Pasal 1708 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai mengembalikan barang titipan itu. Dalam hal terakhir ini ia tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang itu, jika barang itu akan musnah juga sekiranya berada di tangan pemberi titipan”.

Didalam perjanjian Kerjasama titip jual yang dilakukan oleh Cacafood.idn dan Toko Sari sayur telah mencantumkan keadaan-keadaan yang dapat dikategorikan sebagai *overmacht* dalam pasal *force majeure* yaitu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan Para Pihak, antara lain terjadinya gangguan sistem komunikasi, kebakaran, huru hara, perang, kudeta militer, gempa bumi, gedung longsor, badai, petir, banjir besar, wabah penyakit, pemogokan massal, pemberontakan atau tindakan militer lainnya, sabotase. Norma tentang *overmacht* dalam perjanjian penitipan barang yaitu Pasal 1708 KUH Perdata menjelaskan :

“Penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai mengembalikan barang titipan itu. Dalam hal terakhir ini ia tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang itu, jika barang itu akan musnah juga sekiranya berada di tangan pemberi titipan”

Pasal 1711 KUH Perdata: Mereka tidak bertanggung jawab atas perampokan atau pencurian yang diperbuat oleh orang yang oleh pelancong diizinkan datang kepadanya. Perjanjian Konsinyasi yang dilakukan oleh cacafood.idn dan toko sari sayur telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 1708 dan 1711 KUH Perdata. Pelaksanaan perjanjian titip jual atau konsinyasi antara pihak toko sari sayur dengan pihak cacafood.idn juga telah sesuai dengan Pasal 1708 KUH Perdata yang berbunyi:

“Penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai mengembalikan barang titipan itu. Dalam hal terakhir ini ia tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang itu, jika barang itu akan musnah juga sekiranya berada di tangan pemberi titipan”

Penulis berpendapat demikian karena dari penuturan ibu salsabila mengatakan bahwa apabila ada barang yang tidak laku terjual akan di *return* kepada pihak cacafood.idn dengan syarat barang tersebut saat dikembalikan tidak mengalami kecacatan produk atau rusak akibat kesalahan dari pihak toko sari sayur. Beliau juga mengatakan bahwa selama kerjasama dengan pihak toko sari sayur tidak pernah ada barang *return* yang tidak laku mengalami kerusakan.

Pihak yang harus membuktikan adanya *overmacht* dalam BW disebutkan dengan jelas pada Pasal 1244 dan Pasal 1444, yaitu pihak debitur yang terpaksa tidak dapat memenuhi prestasi. Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu

kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi. Risiko tidak beralih kepada debitur. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada perjanjian timbal balik. Mengenai definisi keadaan memaksa tersebut perlu diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut::

- a. Keadaan yang menimbulkan keadaan memaksa tersebut harus terjadi setelah dibuatnya perjanjian, karena jika pelaksanaan prestasinya sudah tidak mungkin lagi sejak dibuatnya perjanjian, maka persetujuan tersebut batal demi hukum disebabkan objeknya tidak ada atau tanpa causa;
- b. Keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi harus mengenai prestasinya sendiri. Berbicara tentang keadaan memaksa, jika karena keadaan yang terjadi kemudian, misalnya kenaikan harga, prestasi masing-masing pihak menjadi tidak seimbang lagi, sedangkan prestasinya sendiri, yaitu menyerahkan barangnya tidak terhalang untuk dilaksanakan.

Permasalahan disini tidaklah perihal keadaan memaksa, namun mengenai sebab-sebab yang lain, yaitu hingga sampai dimanakah dalam suatu perjanjian timbal balik para pihak-pihak yang berdasarkan kepatutan dan itikad baik masih berkewajiban guna memenuhi prestasinya, jika prestasi tersebut terganggu keseimbangannya sebagaimana akibat daripada keadaan yang tidak dapat diduga.

Melalui penjelasan-penjelasan dan analisa diatas penulis mengetahui bahwa meskipun bentuk perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak secara lisan dan hanya disaksikan oleh beberapa orang, akan tetapi penerapan perjanjian konsinyasi antara pihak cacafood.idn dan toko sari sayur telah terpenuhi seluruhnya dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata meskipun ada kelalaian-kelalaian yang dalam prakteknya dapat diselesaikan tanpa harus melalui jalur hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari uraian dan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan penulis maka kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi antara cacafood.idn dan toko sari sayur di kota Tegal karena dua faktor. Yang pertama terjadi akibat atau faktor individu yang tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan prestasi atau karena lalai. Yang kedua faktor keadaan yang memaksa yaitu dimana keadaan ini diluar kendali para pihak, seperti bencana alam, perampokan, cuaca ekstrem dan lain-lain.
2. Penerapan perjanjian konsinyasi antara cacafood.idn dan toko sari sayur sendiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan terpenuhi seluruhnya meskipun pembentukan perjanjian tersebut secara lisan dan hanya disaksikan beberapa orang. Hal ini terbukti dalam penerapan perjanjian konsinyasi tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Dimana syarat objektif dan subjektifnya telah terpenuhi sepenuhnya, baik dari kata sepakat tanpa tekanan dari kedua belah pihak, para pihak telah cakap dalam berbuat hukum, suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian dan terakhir adalah sesuatu yang diperjanjikan dalam perjanjian

konsinyasi tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dan norma-norma sosial di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Para pihak pelaku usaha hendaknya dalam membuat perjanjian selalu dibuat secara tertulis, jelas, dan rinci. Termasuk dalam membuat perjanjian kontrak kerjasama konsinyasi ini, sehingga dapat terhindar dari permasalahan dan sengketa dikemudian hari yang disebabkan oleh salah satu pihak pelaku usaha agar selanjutnya dapat menjalin kerjasama yang produktif dan aman demi kelancaran perekonomian semua pihak.
2. Para pihak pelaku usaha agar dapat bersaing dengan bisnis perdagangan yang lain dan menaikkan jumlah keuntungan serta menarik konsumen yang lebih banyak. Mereka diharapkan dapat memikirkan bagaimana system pelayanan yang baik dan tidak menyampingkan kualitas produknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aliminsyah. Padji. 2008. *“Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan”*. Bandung: Yrama Widya.
- Allan R. Drebin. 1991. *Advanced Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan), ahli bahasa oleh Freddy Sarangih, d.k.k*, Jakarta: Erlangga . Cet. Ke-1
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H, Salim S. 2011. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- H, Salim S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publising.
- M, Frans Royan. 2004. *Creating Effective Sales Force*. Jakarta : CV. Andi Offset. Ed. Ke-2
- Mertokusumo, Sudikno. 1994. *Mengenal Hukum (Suatu Peraturan)*, Bandung: Alumni.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Rajagarfindo Perdasa, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. 2012. *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT.Alumni.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- P.N.H. Simanjuntak. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, PT Penerbit Djambatan.
- P.N.H Simanjuntak. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*, cet. II, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2001. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur.

- R.M. Suryodiningrat. 2003. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung: Tersito.
- Satrio, J. 2002. *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, cet-3.
- Subekti, R. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Selanjutnya disingkat R. Subekti, I), Jakarta: PT. Intermasa.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Soedjono Soekanto & Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. cet. 9, Jakarta: Rajawali Press.
- Subekti, R. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (selanjutnya disingkat R. Subekti, II). Bandung: Penerbit Alumni.
- Subekti. 2007. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta.
- Syaifuddin, Muhammad. 2016. *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsifat, Teori, Dogmatik, dan Praktek Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, cet. II, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm. 338.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta Sinar Grafika.
- Widayat, Utoyo. 1991. *Akuntansi penjualan : angsuran dan konsinyasi*, Jakarta: lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Yahya, M. Harahap. 2003. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, Bandung, cet-3.
- Yudha, Agus Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta:Kencana.
- Yunus, Hadori dan Harnanto. 2011. *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Yogyakarta: BPPE S Manggala.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Jurnal

Amirudin, Ahmad. 2014. *“Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara Distributor Putlet (Distro) Dengan Supplier”*. Skripsi Sarjana Hukum. Surakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Cristian, Deny. 2014. *“Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Di Dapur Roti Bu Haryati”*, Skripsi Sarjana Hukum, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dian, Fajar Aryan. 2019, *Pendampingan Perempuan Warga Binaan Pemasyarakatan Menuju Perempuan Berdikari di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tegal*, Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.

Made, I Aryawan Saddewa. 2015. *“Eksistensi Pengaturan Perjanjian Konsinyasi Dalam Pelaksanaan Penjualan Buku Terbitan Udayana University Press”*, Skripsi Sarjana Hukum, Bali: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

Website

T, Wibowo Tunardy. *Teori-Teori yang Digunakan Untuk Menentukan Terjadinya Kesepakatan*, <https://www.jurnalhukum.com/teori-teori-yang-digunakan-untuk-menentukan-terjadinya-kesepakatan/>. diakses pada tanggal 21 November 2019.

<https://cpssoft.com/blog/bisnis/pengertian-konsinyasi/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020

<http://legalstudies71.blogspot.com/2018/12/pengertian-konsinyasi-penjualan.html>, diakses pada tanggal 23 November 2020

Wawancara

Wawancara dengan Orion. *Owner Toko Sarisayur di Kota Tegal*, pada tanggal 23 Desember 2020

Wawancara dengan Salsabila. *Owner Cacafood.idn di Kota Tegal*, pada tanggal 24 Desember 2020